

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERSERAPNYA
ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

Skripsi

**Diajukan untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Rika Veronika
NIM : 22 2012 364**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika Veronika

NIM : 22 2012 364

Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila ada dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



Rika Veronika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Faktor-faktor Penyebab Tidak Terserapnya Anggaran
Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Palembang

Nama : Rika Veronika
NIM : 22 2012 364
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....
Pembimbing,



(H.M. Basyaruddin R, S.E., AK., M.Si., CA)
NIDN/NBM : 0003055605/784024

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Allah, berharaplah. (Q.S Al Insyirah: 6-8)*
- ❖ *Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.*

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Kedua Orang Tuaku*
- ❖ *Saudara-saudaraku Tersayang*
- ❖ *Teman Dekatku*
- ❖ *Sahabat-sahabat Terbaikku*
- ❖ *Almamater*

PRAKATA



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT terucap atas segala karunianya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor Penyebab Tidak Terserapnya Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (satu) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memerlukan beberapa perbaikan berupa kritik dan saran. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada ayahandaku Azop dan ibundaku Zulharijum yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak H.M Basyaruddin R, S.E., AK., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing yang telah membantu memberikan saran - saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
6. Ayukku Betaria Pransiska AM., AK yang telah membantu membiayai selama kuliah dan adikku Rena Anggaraini.
7. Teman dekatku M.Yudha Pratama yang telah memberikan dorongan serta semangat yang tiada henti sampai pengerjaan skripsi ini selesai dan Sahabat Terbaikku Tessa Marcella Anwar S.E yang selalu memberikan support maupun saran terbaiknya.
8. Teman-teman seperjuangan Indah Permata Sari S.E dan teman-teman satu pembimbing Bapak H.M.Basyaruddin, R. S.E., Ak., M.Si., CA.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

Rika Veronika

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Sebelumnya	7
B. Landasan Teori.....	10
1. Keuangan Daerah	10
a. Pengertian Keuangan Daerah	10
b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	10
c. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
d. Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	13
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	14
a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
b. Fungsi dan Struktur APBD.....	14
c. Siklus APBD.....	16
d. Penyusunan Anggaran.....	17
3. Anggaran Belanja.....	19
a. Pengertian Anggaran Belanja.....	19
b. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	20
c. Pelaksanaan Belanja	24
d. Dokumen-dokumen dalam Pelaksanaan Belanja	25
e. Proses Pelaksanaan Belanja.....	26
f. Pengukuran Belanja	27
4. Faktor-faktor tidak Terserapnya Anggaran Belanja.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Operasionalisasi Variabel.....	34
D. Data yang Diperlukan.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013-2015	4
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	9
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	34
Tabel IV.1	Susunan Kepegawaian Kantor Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan pangkat/golongan.....	43
Tabel IV.2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013-2015	54
Tabel IV.3	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013	62
Tabel IV.4	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2014	64
Tabel IV.5	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2015	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	41
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Riset
Lampiran 2	Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset
Lampiran 3	Jadwal Kegiatan Penelitian Mahasiswa
Lampiran 4	Foto Copy Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Foto Copy Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
Lampiran 6	Sertifikat Membaca Al-Qur'an
Lampiran 7	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran 8	Sertifikat TOEFL
Lampiran 9	Biodata Penulis

ABSTRAK

Rika Veronika/222012364/2016/Faktor-faktor Penyebab Tidak Terserapnya Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk mencapai terserapnya anggaran belanja yang telah ditetapkan pemerintah pada masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk mencapai target anggaran belanja yang ditetapkan pemerintah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah faktor-faktor penyebab tidak terserapnya anggaran belanja. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif komparatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis langsung faktor-faktor penyebab tidak terserapnya anggaran belanja dengan melihat fakta dan teori yang mendukung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja adalah secara keseluruhan karena masalah perencanaan khususnya belanja operasi nilai nominal anggaran yang terlalu besar akhirnya uang pemerintah tidak terserap 100% dan revisi pelaksanaan anggaran belanja modal yang memakan waktu yang lama.

Kata kunci: faktor-faktor tidak terserapnya anggaran belanja.

ABSTRACT

Rika Veronika/222012364/2016/Factors Cause It Absorbed Budget At The Ministry of Youth and Sports Palembang/Public Sector Accounting.

The problems of this study is what factors are causing not absorb the budget at the Ministry of Youth and Sport Palembang and how the efforts of the Ministry of Youth and Sport Palembang to achieve absorption of the budget that has been set by the government on the future. The purpose of this study was to determine the factors that led to the ineffectiveness of the budget at the Ministry of Youth and Sport Palembang and to know the efforts made by the Departement of Education Youth and Sports Palembang to achieve budget targets set by the government.

This research is a descriptive study. The Variabels used are the factors that cause not absorb budget. The data used are primary and secondary data. The data collection technique was interview and observation. The analytical method used is a comparative qualitative analysis methods. The analysis technique used in this study by analyzing direct causal factor not absorb the budget by looking at the facts and theories that support the Departement of Education Youth dan Sports.

The results of this study indicate that factors that cause absorption of the overall budget is due to the problem of planning at nominal value operating expenditure budget is due to large end government money is not absorbed 100% and revision of the implementation of the capital expenditure budget which takes a long time.

Keywords: factors not absorb budget.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi akan memicu persaingan dalam perekonomian, instansi pemerintah dituntut untuk dapat menyusun dan menerapkan suatu anggaran yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi instansi dalam mencapai suatu tujuan. Banyaknya komentar dari masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintah sering berbeda. Artinya, terjadi kesenjangan harapan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan masyarakat.

Hal ini sebagai akibat dari tidak adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Para pengelola pemerintah sering mempunyai pemikiran bahwa ukuran keberhasilan instansi pemerintah ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Jadi suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak yang dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan masih berada jauh dibawah standar,

keberhasilan ini hanya ditekankan pada aspek *input* tanpa melihat tingkat *output* maupun dampaknya.

Mardiasmo (2009: 61) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan anggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Masyarakat mengharapkan keberhasilan instansi pemerintah adalah tindakan nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis yang dapat memajukan perekonomian.

Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sendiri merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang dalam hal melaksanakan program kegiatan pemerintahan di bidang pendidikan pemudaan dan olahraga, yang menjadi tanggungjawabnya meliputi 15 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan disiplin apparatus, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, program dana alokasi khusus (DAK), program lanjutan kepada pihak ketiga, program pendidikan anak usia dini (PAUD), program wajib belajar

pendidikan dasar Sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan peran serta kepemudaan, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Pembangunan sektor pendidikan merupakan sebuah kewajiban pemerintah dalam rangka untuk perwujudkan visi dan misi bangsa sebagaimana di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan daya serap anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin. Penyerapan dana tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif karena didalamnya masih ada program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan sedikit yang terlaksana pada tahun anggaran yang bersangkutan. Tidak efektifnya anggaran belanja ini mungkin disebabkan oleh banyaknya faktor penyebab diantaranya Sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, proses tender yang memakan waktu yang lama, program baru bisa dilaksanakan akhir tahun, perencanaan anggaran tidak matang, anggaran sering mengalami revisi, internal satuan kerja pengelolaan keuangan jumlahnya

terbatas, dokumen anggaran yang tidak jelas, pelaksanaan anggaran tidak dipahami dengan baik.

Tabel I.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013-2015

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Tahun 2013	1.286.257.517.480	1.196.379.120.903	93,01
Belanja Pegawai	1.058.746.031.180	979.330.464.088	92,49
Belanja Barang	66.206.685.240	60.224.794.619	90,96
Belanja Modal	161.304.801.060	156.823.863.196	97,22
Tahun 2014	1.343.563.330.715	1.173.129.140.338	87,31
Belanja Pegawai	1.173.051.741.300	1.036.056.767.668	88,32
Belanja Barang	64.935.072.360	56.958.201.054	87,72
Belanja Modal	105.576.517.055	80.114.171.616	75,88
Tahun 2015	1.381.754.387.809	1.231.585.894.056	89,13
Belanja Pegawai	1.195.282.305.675	1.052.110.164.240	88,02
Belanja Barang	47.009.347.020	45.000.036.685	95,72
Belanja Modal	139.462.735.113	134.475.693.131	96,42

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016.

Berdasarkan tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang pada 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan di tiap tahunnya. Pada tahun 2013 realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan anggaran yang diberikan pemerintah yaitu 93,01%, ditahun 2014 realisasi anggaran menurun dari tahun sebelumnya yaitu 87,31%, selanjutnya pada tahun 2015 realisasi anggaran meningkat lagi sebesar 89,13%.

anggaran belanja yang efektif. Ketidakefektifan ini selain berdampak pada tidak dapat terserapnya anggaran belanja sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor Penyebab Tidak Terserapnya Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk mencapai terserapnya anggaran belanja yang telah ditetapkan pemerintah pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk mencapai target anggaran belanja yang ditetapkan pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam meningkatkan tingkat efektifnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

- b. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan positif bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Palembang untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi atas anggaran yang ada.

- c. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan untuk digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan menjadi sumber informasi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Hendris Hendriyanto (2012) yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratori. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan masalah lebih tepat, mengembangkan hipotesis, menetapkan prioritas untuk riset lebih lanjut, mengumpulkan informasi, meningkatkan pengetahuan analisis dan menjelaskan konsep-konsep secara sistematis. Metode data menggunakan data kuisoner. Metode analisis yang digunakan regresi. Hasil penelitian yaitu terdapat 4 faktor penyebab tidak terserapnya anggaran belanja.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mashudi Adi Nugroho (2013) yang berjudul Analisis yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang). Ruang lingkup penelitian ini adalah proses pencairan dana APBN di KPPN Malang yang menumpuk di akhir tahun. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, yaitu jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi-dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data

yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penumpukan pencairan dana di akhir tahun yang terjadi di KPPN Malang dipengaruhi oleh 6 faktor yaitu faktor perencanaan, faktor peraturan, faktor sumber daya manusia, faktor teknis, faktor kendala koordinasi, faktor pengadaan barang/jasa.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Prasetyo Adi Priatno (2013) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode kuantitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui mengenai gejala yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran pada satuan kerja dan untuk melihat bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja lingkup pembayaran KPPN blitar.

Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN blitar terdapat 15 indikator penyebab.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hendris Hendriyanto (2012) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta	Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja.	Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya dilakukan di kementrian/lembaga di wilayah Jakarta, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
Mashudi Adi Nugroho (2013) Analisis yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang).	Sama-sama menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder, dan sama-sama membandingkan pekerjaan dilapangan dengan teori.	Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya dilakukan di KPPN Malang sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
Prasetyo Adi Priatno (2013) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar	Persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan membandingkan kenyataan dilapangan dengan teori.	Perbedaannya pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Kota Blitar, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Sumber: Penulis, 2016.

B. Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah menurut Baldric Siregar (2015: 12) meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan daerah.

c. Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Baldric Siregar (2015: 12) menjelaskan bawah keuangan daerah dikelola dengan azaz tertentu. Azaz umum pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan.

9. Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

d. Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan Negara meliputi :

1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan Negara
4. Pengeluaran Negara
5. Penerimaan Daerah
6. Pengeluaran Daerah
7. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Baldric Siregar (2015: 29) menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Fungsi dan struktur APBD

Baldric Siregar (2015: 29) menjelaskan bahwa anggaran mempunyai banyak fungsi diantaranya yaitu :

1) Fungsi Otorisasi

APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

6) Fungsi Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Struktur utama APBD adalah :

1) Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2) Belanja daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

3) Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ada dua kategori pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

c. Siklus APBD

Baldric Siregar (2015: 32) menjelaskan bahwa siklus anggaran adalah jangka waktu sejak anggaran disusun dengan pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan. Ada lima tahap kegiatan pokok dalam siklus anggaran yaitu :

- 1) Penyusunan anggaran
- 2) Pengesahan anggaran

- 3) Pelaksanaan anggaran
- 4) Pengawasan anggaran
- 5) Pertanggungjawaban anggaran

d. Penyusunan Anggaran

Baldric Siregar (2015: 3) menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran tidak selalu mulai pada bulan yang sama setiap tahunnya tergantung pada waktu TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dibentuk. Penyusunan RAPBD melibatkan :

1) Pihak-pihak yang terkait

Penyusunan RAPBD melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPBD adalah :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
- b. Satuan kerja perangkat daerah
- c. Pejabat pengelola keuangan daerah
- d. Sekretariat daerah
- e. Kepala daerah
- f. Dewan perwakilan rakyat daerah

2) Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD

Penyusunan RAPBD melibatkan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen yang dibuat dalam penyusunan RAPBD adalah :

a. Kebijakan umum APBD (KUA)

Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

b. Nota Kesepakatan KUA

Setelah KUA disusun lalu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD. Setelah KUA dibahas, kepala daerah dan DPRD melakukan kesepakatan dalam Nota Kesepakatan KUA. Isi pokok nota kesepakatan yaitu :

1. Kerangka ekonomi makro
2. Asumsi penyusunan APBD
3. Kebijakan Pendapatan
4. Kebijakan Belanja
5. Kebijakan Pembiayaan

c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dapat diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Sedangkan plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap SKPD.

d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana kerja dan anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan. Ada lima proses utama dalam penyusunan RAPBD yaitu penyusunan KUA, penyusunan PPAS, penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD, penyusunan RKA SKPD, penyiapan RAPBD.

3. Anggaran Belanja

a. Pengertian Anggaran Belanja

Baldric Siregar (2015: 161) menjelaskan bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang terdiri dari atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah kota dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung

1). Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

a. Belanja pegawai

merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja bunga

digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja subsidi

digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

d. Belanja hibah

bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

e. Bantuan sosial

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

f. Belanja bagi hasil

digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan keuangan

digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan

kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

h. Belanja tidak terduga

merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja pegawai

untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c. Belanja modal

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

c. Pelaksanaan Belanja

Baldric Siregar (2015: 45) menjelaskan bahwa pelaksanaan belanja melibatkan :

1) Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait didalam pemerintah dalam pelaksanaan belanja adalah :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- d. Bendahara Pengeluaran
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)
- f. Pengguna Anggaran (PA)
- g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- h. Bendahara Umum Daerah (BUD)
- i. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
- j. Sekretaris Daerah (Setda)

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan belanja diluar pemerintahan seperti bank dan pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan.

d. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja

Siregar Baldrice (2015: 46) menjelaskan bahwa dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja yaitu :

1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

2) Anggaran Kas

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

3) Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang dibuat oleh bendaharawan umum dalam rangka manajemen kas. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi setiap SKPD dalam jangka waktu tertentu.

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara.

5) Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.

6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum berdasarkan SPM yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

e. Proses Pelaksanaan Belanja

Baldric Siregar (2015: 53) ada beberapa jenis pembebanan pengeluaran kas dalam APBD. Jenis-jenis pembebanan tersebut adalah Utang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU), dan Pembebanan Langsung (LS). Pada dasarnya proses pokok dalam pelaksanaan belanja meliputi :

- 1) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- 2) Penyusunan Anggaran Kas
- 3) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

- 4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 5) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- 6) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 7) Pembelanjaan Dana
- 8) Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

f. Pengukuran Belanja

Baldric Siregar (2015: 175) menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum atau rekening.

4. Faktor-faktor tidak terserapnya anggaran belanja pemerintah

Yustika (2012: 15) menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran, yaitu :

- a) Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN.

Penelaahan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Lambatnya penyerapan anggaran disebabkan karena sebagian

proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan. Selain itu, tidak adanya inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif masih lama.

- b) Adanya proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan program.

Setiap program yang berjalan dengan nilai proyek yang besar dan pengerjaan yang rumit, sesuai dengan aturan harus melalui proses tender yang memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pelaksanaan program tersebut pada awal tahun belum dapat dimulai. Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti tender kurang dari persyaratan maka harus dilakukan tender ulang, dan hal itu akan semakin menghambat pelaksanaan program.

- c) Terdapat beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awaltahun.

Program-program seperti monitoring dan evaluasi atas program/proyek yang dijalankan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Selain itu juga terdapat kegiatan yang pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan musim khususnya yang berkaitan dengan pertanian, misalnya subsidi benih dan pupuk yang baru tepat diberikan saat musim tanam sekitar bulan September/Oktober.

Faktor-faktor tidak terserapnya anggaran belanja pemerintah menurut Mulyana dan Budi (2010) adalah :

a) Perencanaan Penganggaran

Perencanaan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak matang juga akan berdampak pada evaluasi dan revisi secara terus menerus oleh pejabat terkait pada aspek perencanaan tersebut. Jika hal ini berlangsung lama, maka pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan akan terhambat dan mengalami kemunduran jadwal. Pada akhirnya anggaran belum dapat dibelanjakan dan akhirnya mengalami penumpukan.

b) Pelaksanaan Anggaran

Beberapa program dan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran sering mengalami revisi, sehingga program dan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan. Petunjuk operasional kegiatan yang telah ditetapkan, seringkali terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Peraturan tentang mekanisme pencairan dana APBD kurang jelas. Jika hal-hal ini yang terjadi, sudah tentu anggaran yang tersedia akan terlambat untuk diserap dan mengalami penumpukan.

c) Internal Satuan Kerja

Pengelola keuangan satuan kerja sering mengalami mutasi/pindah kerja ke tempat lain. Selain itu, sumber daya manusia di satuan kerja yang memahami pengelolaan keuangan, jumlahnya terbatas. Satuan kerja kurang memahami mekanisme pencairan dana APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran. Pemahaman satuan kerja terhadap program kegiatan dalam APBD adalah rendah. Hal-hal ini jika terjadi akan menyebabkan pelaksanaan anggaran terhambat yang berujung pada penumpukan penyerapan anggaran.

d) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM satuan kerja (SKPD) yang bekerja untuk memahami perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memiliki pengetahuan dan kompetensi yang terbatas. Ketidakharmonisan bekerja antar bagian terkait dalam lingkungan SKPD juga akan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan anggaran. Keterlambatan pelaksanaan anggaran dari jadwal yang telah disusun menyebabkan anggaran yang tersedia akan menumpuk.

e) Dokumen

Dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan anggaran tidak lengkap dan jelas, sehingga perlu direvisi. Dokumen penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu singkat dan pendek, sehingga sering menyebabkan kesulitan dalam mempersiapkan data-data pendukung. Jadwal-jadwal kegiatan dalam pelaksanaan anggaran terlambat disusun

karena dokumen yang belum siap. Hal-hal terkait dengan dokumen ini sudah tentu akan menyebabkan pelaksanaan anggaran akan terlambat dilakukan sehingga mengalami penumpukan penyerapan anggaran.

f) Administrasi

Sistem administrasi dan prosedur akuntansi dalam pelaksanaan anggaran tidak dipahami dengan baik oleh pejabat terkait. Administrasi penatausahaan keuangan daerah terkait kebijakan pengelolaan APBD tidak tersusun dengan jelas. Penyusunan laporan pembiayaan maupun belanja tidak disertai dokumen-dokumen penunjang. Laporan keuangan SKPD yang merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal oleh pejabat terkait. Jika hal-hal ini terjadi dalam tempo waktu yang lama, maka akan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran. Pada akhirnya anggaran akan mengalami penumpukan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor penyebab tidak terserapnya anggaran belanja setiap tahun. Namun harus diingat juga bahwa meskipun kesemua aspek di atas telah dilaksanakan dengan baik, tidak ada jaminan bahwa anggaran APBD yang tersedia dapat habis terserap 100% dan sama sekali tidak mengalami penumpukan. Resiko anggaran pemerintahan daerah untuk menumpuk tetap ada, namun besaran rasionya yang harus diperhatikan. Pemerintahan daerah yang memiliki tata kelola yang baik tentunya harus bisa

menggunakan anggaran yang tersedia untuk kelancaran proses pembangunan daerahnya, indikatornya adalah bahwa anggaran yang tersedia bisa terserap secara optimal pada pelaksanaan program-program kegiatan. Artinya memang terdapat prosentase anggaran yang belum terserap yang cukup besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antar dua variable atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang tujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang sifatnya menjelaskan faktor-faktor tidak terserapnya anggaran belanja atas pelaksanaan anggaran program kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Jalan Dr. Wahidin No.03 Telp/Fax.0711 360665 353007 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan definisi yang menyatakan dengan cara menentukan pemikiran atau gagasan berupa kriteria-kriteria yang dapat diuji secara khusus bagi suatu penelitian menjadi variabel yang dapat diukur.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Faktor-faktor penyebab tidak terserapnya anggaran belanja	Belanja adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang terdiri dari atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah kota dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penganggaran b. Pelaksanaan anggaran c. Internal satuan kerja d. Sumber daya manusia (SDM) e. Dokumen f. Administrasi

Sumber: Penulis, 2016

D. Data yang diperlukan

Menurut Sugiyono (2011: 137) data yang diperlukan dalam penelitian ada 2, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan staf kasubbag keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan dokumen laporan realisasi anggaran dan belanja tahun 2013-2015.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 402-405) menyatakan teknik dalam pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang

4. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan khususnya bagian keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin maupun mengutip dokumen yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2009: 13-14) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif. Analisis kualitatif komparatif yaitu digunakan untuk membandingkan data lapangan dengan teori yakni hal-hal yang mengenai faktor-faktor tidak terserapnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis langsung faktor-faktor penyebab tidak terserapnya anggaran belanja dengan melihat fakta dan teori yang mendukung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah singkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

Palembang

Keberadaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, merupakan kelanjutan tugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang ini resmi berganti nama pada tahun 2008 yang lalu, seiring dengan adanya Perda No./ 2008 tentang efisiensi Dinas, Badan, atau Lembaga yang ada dilingkungan kerja Pemerintah Kota Palembang.

Dengan terjadinya perampingan Dinas atau instansi ini, maka terjadi penambahan personel dalam struktur organisasi di Dinas Dikpora Palembang. Nama pun menjadi berubah, yang dulu dikenal ada Wakil Kepala Dinas, sekarang ditiadakan, diganti dengan sekretaris. Dulu ada jabatan Kepala Sub Dinas, sekarang menjadi Kepala Bidang, dan seterusnya. Pemekaran struktur organisasi pun terjadi, sekarang Kepala Bidang (Kabid) menjadi beberapa bagian antara lain: Kabid TK, SD, Kabid SMP/ SMA, Kabid Pemuda, Kabid OLahraga, Kabid Program, dan banyak lagi.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang merupakan salah satu organ pemerintahan Kota Palembang dengan tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga dalam bidang pendidikan dengan terwujudnya proses pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan keragaman kebutuhan dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan tanggung jawab pokok sebagaimana instansi pemerintah lainnya yaitu menciptakan pelayanan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup fungsi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

a) Visi

“Terwujudnya Palembang Kota Pendidikan yang Madani, Merata dan Berkualitas”.

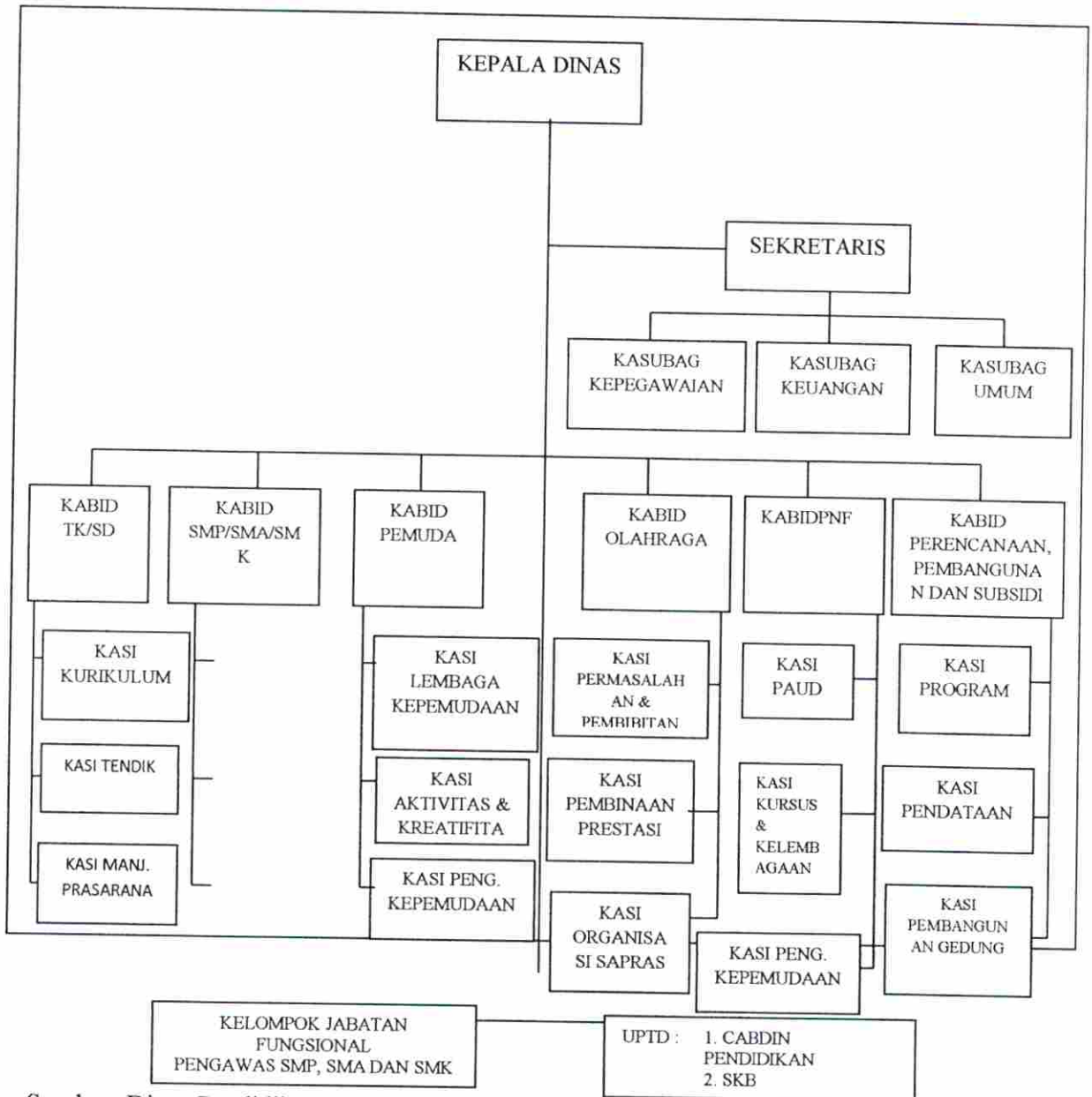
b) Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

- 1) Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan tuntas wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas organisasi pemuda.
- 4) Dan olahraga.

c. Struktur Organisasi

Berikut dibawah ini yang merupakan gambar dari struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Gambar IV. 1
Srtuktur Organisasi



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016

d. Profil Personil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Palembang

Dengan telah diterbitkannya Perda Kota Palembang No. 9 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M.

2. Sekretaris : Drs. H. Hanafiah, M.M.

Kepala Sub Bagian Umum : H. Sodik, SE., M.M.

Kepala Sub Bagian Keuangan : H. M. Herwin Fadli, SE., M.M.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Drs. H. Nasikun, M.M.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi(PPS) :

Hasanuddin, S.Pd., M.Si.

4. Kepala Bidang TK / SD : Bahrin, S.Pd., M.M.

5. Kepala Bidang SMP / SM : Drs. H. Lukman Hasis, M.M.

6. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal : Asa'ari, SH

7. Kepala Bidang Pemuda : Hj. Mulyani, SH.

8. Kepala Bidang Olahraga : H. Azhari, S.Pd., M.M.

9. Kepala Dinas Kecamatan yang terdiri dari :

e. Susunan Kepegawaian Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan pangkat/golongan

Susunan Kepegawaian Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan pangkat/golongan Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel IV. 1
Susunan Kepegawaian Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan pangkat/golongan

Tingkat Pendidikan	Pangkat / Golongan dan Jlh (org)														
	IV. c	IV. b	Iv a	III. d	III. c	III. b	III. a	II. d	II. c	II. b	II. a	I. d	I. c	I. b	Jlh
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	2	20	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	36
S1	-	-	1	6	43	10	19	-	-	-	-	-	-	-	39
D.III	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6
SLTA	-	-	-	-	-	12	-	1	4	4	3	-	-	-	24
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	2	21	15	49	26	19	2	4	4	3	-	-	-	106

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2015

f. Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing ini yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas

Tugas:

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepala dinas mempunyai fungsi.

- a) Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan siswa baru dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu.
- b) Penyedia bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pendidikan kualifikasi dan sertifikasi guru.
- c) Penyediaan dukungan/ bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademisi.
- d) Penyelenggaraan kebijakan dinas pendidikan dalam upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e) Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional

2. Sekertaris

Tugas:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan hukum, organisasi dan tatalaksana hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Mengatur kegiatan pelaksanaan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan di lingkungan dinas.
 - b) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - c) Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan
 - d) Pelaksanaan urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
 - e) Pemantauan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas kepada subbagian sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier
 - f) Penyusunan dan pemberian laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang pendidikan taman kanak-kanak sekolah dasar dan pendidikan khusus

Tugas:

Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemetaan memperoleh pendidikan peningkatan mutu relevansi pendidikan serta peningkatan efisien dan efektifitas pengelolaan pendidikan Taman kanak-kanak, sekolah dasar dan pendidikan khusus.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, bidang pembinaan pendidikan dasar:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan pendidikan dasar.
- b) Pemantauan, pengkoordinasian dan penilaian pelaksanaan tugas kepala seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan dasar dan pendidikan khusus.
- c) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dalam lingkup bidang pembinaan pendidikan dasar meliputi taman kanak-kanak (TK), pendidikan luar biasa (SLB), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah (SMP), serta menetapkan standarisasi sarana dan prasarana sekolah.
- d) Pelaksanaan penelitian, pengujian, pengkajian, pembahasan pendidikan dasar dan pendidikan khusus.
- e) Penyusunan rencana kegiatan penilaian dan pengembangan dalam berbagai aspek pendidikan dasar dan pendidikan khusus.

- f) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan penilaian dan pengembangan sekolah dasar (SD) dan sekolah khusus.
- g) Penyusunan rencana pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
- h) Penetapan standar kompetensi minimal peserta didik lulusan pendidikan sekolah dasar.
- i) Penetapan persyaratan, kriteria, prosedur, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar.
- j) Pemantauan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis pendidikan dasar.
- k) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas pengawasan sekolah.
- l) Penghimpunan, pengelolaan dan penyusunan data statistik pendidikan dasar mengenai informasi terkini yang akurat dan muktahir.
- m) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan tata usaha dan hubungan antar sekolah.
- n) Penilaian kelayakan dan kualitas alat bantu belajar, buku pelajaran, buku pegangan guru dan buku perpustakaan sekolah.

- o) Pemberian pelayanan teknis dibidang pendidikan dasar untuk jenjang pendidikan luar biasa (SLB).
- p) Penyusunan dan pemberian laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas.
- q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang sekolah menengah pertama dan bidang sekolah menengah atas

Tugas:

Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

5. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi

Tugas:

Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan menengah kejuruan serta pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang pembinaan dimenti memiliki fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program bidang pembinaan dan pendidikan menengah dan perguruan tinggi sebagai pedoman pelaksanaan sasaran tugas.
- b) Pengkoordinasian tugas kepala seksi dalam pelaksanaan tugas kepala seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier,
- c) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan sekolah menengah umum, kejuruan dan perguruan tinggi.
- d) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sekolah menengah umum dan kejuruan meliputi kurikulum, tenaga pendidik, sarana pendidikan dan pengajaran, ketatausahaan dan hubungan antar sekolah dan masyarakat.
- e) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sekolah menengah umum dan kejuruan meliputi kurikulum, tenaga pendidik, sarana pendidikan dan penyelenggaraan ketatausahaan dan hubungan antar sekolah dan masyarakat.
- f) Penyusunan persyaratan penerimaan, perpindahan siswa, dan mahasiswa.

- g) Penyusunan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dan masyarakat minoritas keterbelakangan dan atau tidak mampu.
- h) Penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa pemberian bantuan/ dukungan sarana dan prasarana pendidikan.
- i) Penelaahan bahan usulan untuk memberikan rekomendasi izin pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- j) Penghimpunan, pengelolaan data sekolah menengah atas, kejuruan dan perguruan tinggi.
- k) Penyusunan dan pemberian laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas.
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan fungsinya.

6. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Nilai Budaya

Tugas:

Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan non formal, informal dan nilai Budaya.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dibidang pembinaan non formal dan informasi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan program pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas), program pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.
- b) Pelaksanaan rencana program PAUD, penjas, program pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.
- c) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program PAUD dan penjas dan nilai budaya.
- d) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pada seksi PAUD, penjas dan nilai budaya.
- e) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin sebagai bahan pengambilan keputusan.
- f) Penyusunan rencana dan program kerja bidang dan pedoman pelaksanaan tugas.
- g) Pemberian tugas kepada seksi sesuai bidangnya.
- h) Pemberian petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i) Pengkoordinasian kepala seksi dalam melaksanakan tugas.
- j) Pemantauan dan penilaian prestasi pelaksanaan tugas kepada seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
- k) Penelahaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan pada program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas), program pendidikan masyarakat dan kesetaraan,

pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan jasmanin (Penjas) serta kebudayaan.

- l) Penghimpunan isu masalah dan penyusunan saran alternatif pemecahan terhadap program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas). Program pendidikan masyarakat dan nilai budaya.
- m) Pengadaan pengkajian, pengujian, program pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas), pendidikan masyarakat dan pendidikan nilai budaya.
- n) Pemberian layanan teknis dan administrasi pada program PAUD, penjas, pendidikan dan nilai budaya.
- o) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendidikan non formal, informal dan nilai budaya.
- p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tugas:

Melaksanakan pemyiapan kebijakan operasional pembinaan karier, peningkatan mutu profesionalisme, serta pelayanan serta perlindungan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

8. Sekertariat, bidang Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang: UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

Tugas:

Mempunyai tugas dinas pendidikan dan pelatihan teknik, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

9. UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan, Ketatausahaan, dan Pelayanan Masyarakat.

10. UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas dalam pendidikan dan pengembangan taman budaya ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. UPT pendidikan dan Pengembangan Kesenian dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kesenian serta peningkatan profesionalisme peserta didik dalam berkesenian.

11. Sekretariat, Bidang, Sub, bagian dan Seksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Tugas:

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

2. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tahun 2011 sampai dengan 2014

Tabel IV.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013-2015

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Tahun 2013	1.286.257.517.480	1.196.379.120.903	93,01
Belanja Pegawai	1.058.746.031.180	979.330.464.088	92,49
Belanja Barang	66.206.685.240	60.224.794.619	90,96
Belanja Modal	161.304.801.060	156.823.863.196	97,22
Tahun 2014	1.343.563.330.715	1.173.129.140.338	87,31
Belanja Pegawai	1.173.051.741.300	1.036.056.767.668	88,32
Belanja Barang	64.935.072.360	56.958.201.054	87,72
Belanja Modal	105.576.517.055	80.114.171.616	75,88
Tahun 2015	1.381.754.387.809	1.231.585.894.056	89,13
Belanja Pegawai	1.195.282.305.675	1.052.110.164.240	88,02
Belanja Barang	47.009.347.020	45.000.036.685	95,72
Belanja Modal	139.462.735.113	134.475.693.131	96,42

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016.

B. Hasil Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan membahas mengenai beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja pada Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk mencapai terserapnya anggaran belanja yang telah ditetapkan pemerintah pada masa yang akan datang dengan membandingkan data dilapangan dengan teori yang ada yakni hal-hal yang mengenai faktor-faktor tidak terserapnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

1. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

a. Perencanaan Penganggaran

Perencanaan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Penganggaran juga merupakan tujuan spesifik yang harus dicapai. Perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak matang akan berdampak pada evaluasi dan revisi secara terus menerus oleh pejabat terkait pada aspek perencanaan tersebut. Jika hal ini berlangsung lama, maka pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan akan terhambat dan mengalami kemunduran jadwal. Pada akhirnya anggaran belum dapat dibelanjakan dan akhirnya mengalami penumpukan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada kabid perencanaan, pembangunan dan subsidi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Bapak Drs. Hasanuddin, S.Pd.,M.Si mengatakan bahwa perencanaan anggaran punya pengaruh yang signifikan di instansi pemerintah tersebut, maka apabila faktor perencanaan semakin baik maka mempunyai probabilitas atau kecenderungan terhadap perubahan peningkatan terhadap penyerapan anggaran itu sendiri. Faktor perencanaan sendiri masih tergolong buruk kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran hal tersebut disebabkan karena penetapan anggaran (DIPA) selalu mengalami keterlambatan, penyusunan dan penelaah anggaran selama ini dianggap kurang baik dalam merencanakan pencairan dana khususnya untuk awal-awal tahun anggaran, waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran terbatas, sering terdapat program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam DIPA, adanya pejabat pengelola keuangan yang sering mengalami mutasi juga turut memperburuk faktor perencanaan dalam pencairan dana, pelaksanaan kegiatan sering mengabaikan jadwal DIPA, dalam proses perencanaan penyusunan anggaran sering terdapat program/kegiatan yang kurang realistis, adanya alokasi anggaran yang diblokir mengakibatkan anggaran tersebut tidak dapat dicairkan, dan masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu lama juga

mengakibatkan keterlambatan pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa.

b. Pelaksanaan Anggaran

Beberapa program dan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran sering mengalami revisi karena pada saat menyusun perencanaan anggaran kurang tepat dan tidak realistis, sehingga program dan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara pada sekretaris dari bagian umum dan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Palembang Bapak Drs. H. Hanifah, M.M dan kbid perencanaan, pembangunan dan subsidi Bapak Drs. Hasanuddin, S.Pd mengatakan bahwa anggaran sering mengalami revisi karena petunjuk operasional kegiatan yang telah ditetapkan, terdapat kegiatan atau program yang tidak dapat langsung dilaksanakan (memerlukan revisi) dalam DIPA, seringkali terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan peraturan tentang mekanisme pencairan dana APBD kurang jelas, dan perencanaan anggaran yang dibuat kadang tidak memenuhi kebutuhan yang ada sehingga revisi anggaran harus direvisi secara terus-menerus. Jika hal-hal ini yang terjadi, sudah tentu anggaran yang tersedia akan terlambat untuk diserap dan mengalami penumpukan.

c. Internal Satuan Kerja

Pengelola keuangan satuan kerja sering mengalami mutasi/pindah kerja ke tempat lain. Selain itu, sumber daya manusia di satuan kerja yang memahami pengelolaan keuangan jumlahnya terbatas. Satuan kerja kurang memahami mekanisme pencairan dana APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala Sub. Bagian Umum Bapak H. Sodik, S.E., M.M dan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Bapak Drs.. H. Nasikun, M.,M Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang mengatakan bahwa tidak meratanya pengetahuan dan keahlian khusus dalam proses penatausahaan keuangan Negara yang membuat adanya masa transisi pergantian pejabat pengelolaan keuangan dan juga internal satuan kerja cukup penting peranannya terhadap tanggung jawab pengelolaan anggaran program kegiatan dalam APBD agar penyerapan anggaran tidak rendah. Hal-hal ini jika terjadi akan menyebabkan pelaksanaan anggaran terhambat yang berujung pada penumpukan penyerapan anggaran.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) satuan kerja (SKPD) yang bekerja untuk memahami perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Didalam sumber daya manusia tidak hanya pegawai yang berkerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tersebut tetapi juga ada pihak-pihak yang mendukung realisasi anggaran seperti pihak pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan program anggaran, pihak

ketiga guna membantu pembiayaan, dan kontraktor yang membantu menggunakan anggaran untuk membangun sekolah-sekolah di setiap wilayah. Berdasarkan hasil wawancara pada melalui dokumen pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala Sub. Bagian Umum Bapak H. Sodik, S.E., M.M dan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Bapak Drs.. H. Nasikun, M.,M Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang mengatakan bahwa sumber daya manusia di instansi tersebut memiliki kompetensi dan pengetahuan yang terbatas, penerbitan SK Pengelolaan keuangan (KPA dan Pejabat Pengelol Kegiatan) di satuan kerja sering mengalami keterlambatan, pejabat/pegawai di instansi sering mengalami mutasi/pergantian yang melibatkan pejabat pengelola keuangan, pegawai yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya rata-rata tidak mnegalami perubahan yang besar, kekurangan akan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, SDM pelaksana pengadaan kurang kompeten, rangkap tugas dalam jabatan Panitia Pengadaan, ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi, keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangny resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima, dan adanya ketidakharmonisan bekerja antar bagian terkait dalam lingkungan SKPD juga akan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan anggaran. Keterlambatan pelaksanaan

anggaran dari jadwal yang telah disusun menyebabkan anggaran yang tersedia akan menumpuk. Namun, sumber daya manusia sendiri tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

e. Dokumen

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian Kabid Perencanaan, pembangunan dan subsidi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Bapak Hasanuddin, S.Pd., M.Si mengatakan dokumen-dokumen yang terkait mengenai dokumen pengadaan barang dan jasa yang pengaruhnya sangat besar dalam penggunaan uang anggaran, pelaksanaan seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sering tidak lengkap dan jelas, sehingga perlu direvisi. Dokumen penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu singkat dan pendek, sehingga sering menyebabkan kesulitan dalam mempersiapkan data-data pendukung. Jadwal-jadwal kegiatan dalam pelaksanaan anggaran terlambat disusun karena dokumen yang belum siap. Hal-hal terkait dengan dokumen ini sudah tentu akan menyebabkan pelaksanaan anggaran akan terlambat dilakukan sehingga mengalami penumpukan penyerapan anggaran. Dan juga dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam surat permohonan pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum sering kurang jelas.

f. Administrasi

Sistem administrasi dan prosedur akuntansi dalam pelaksanaan

anggaran tidak dipahami dengan baik oleh pejabat terkait. Berdasarkan hasil wawancara pada bagian umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Bapak H. Sodik, S.E., M.M mengatakan administrasi penatausahaan keuangan daerah terkait kebijakan pengelolaan APBD tidak tersusun dengan jelas, salah dalam penentuan akun, penyusunan laporan pembiayaan maupun belanja tidak disertai dokumen-dokumen penunjang, satuan kerja sering mengalami keterlambatan penetapan surat keputusan pejabat pengelola keuangan yang mempunyai DIPA, dana yang dicairkan menggunakan prosedur yang berbelit-belit yang tidak sejalan dengan adanya reformasi birokrasi yang tumbuh dikementrian keuangan laporan keuangan SKPD yang merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal oleh pejabat terkait. Jika hal-hal ini terjadi dalam tempo waktu yang lama, maka akan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran. Pada akhirnya anggaran akan mengalami penumpukan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor penyebab tidak terserapnya anggaran belanja setiap tahun. Namun harus diingat juga bahwa meskipun kesemua aspek di atas telah dilaksanakan dengan baik, tidak ada jaminan bahwa anggaran APBD yang tersedia dapat habis terserap 100% dan sama sekali tidak mengalami penumpukan. Resiko anggaran pemerintahan daerah untuk menumpuk

tetap ada, namun besaran rasionya yang harus diperhatikan. Pemerintahan daerah yang memiliki tata kelola yang baik tentunya harus bisa menggunakan anggaran yang tersedia untuk kelancaran proses pembangunan daerahnya, indikatornya adalah bahwa anggaran yang tersedia bisa terserap secara optimal pada pelaksanaan program-program kegiatan. Artinya memang terdapat prosentase anggaran yang belum terserap yang cukup besar.

Tabel IV.3
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2013

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.124.952.716.420	1.039.555.258.707	92,41
Belanja Pegawai	1.058.746.031.180	979.330.464.088	92,50
Belanja Barang	66.206.685.240	60.224.794.619	90,96
BELANJA MODAL	161.304.801.060	156.823.862.196	97,22
Belanja Tanah	350.000.000	345.965.000	98,85
Belanja Peralatan dan Mesin	38.281.940.400	37.114.274.260	96,95
Belanja Gedung dan Bangunan	113.502.538.850	110.430.784.884	97,29
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.920.060.810	1.856.627.690	96,70
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.250.261.000	7.076.210.362	97,60
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah	1.286.257.517.480	1.196.379.120.903	93,01

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016.

Berdasarkan tabel IV.3 disamping menunjukkan bahwa kemampuan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam menggunakan

anggaran pada tahun 2013 sudah sangat baik. Anggaran belanja sebesar Rp. 1.286.257.517.480 dan anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.196.379.120.903 jika dijadikan persen sebesar 93,01% anggaran yang telah terserap.

Unsur-unsur belanja di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yaitu terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Untuk belanja operasi hanya belanja barang yang hanya mencapai persentase terendah sebesar 90,96, persentase rendah ini disebabkan karena pada belanja operasi masih banyaknya sisa belanja operasi pada tahun sebelumnya jadi tahun ini dinas tidak begitu banyak membeli lagi dan juga karena ketika waktu rencana penganggaran nominal yang diberikan besar sehingga banyak sisa lebih anggaran.

Untuk belanja modal semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, secara keseluruhan sudah terialisasi secara optimal. belanja langsung semua program kegiatan yang di targetkan secara keseluruhan terialisasi sesuai dengan yang ditargetkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tahun 2013 sudah berhasil.

Tabel IV.4
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2014

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.237.986.813.660	1.093.014.968.722	88,29
Belanja Pegawai	1.173.051.741.300	1.036.056.767.668	88,32
Belanja Barang	64.935.072.360	56.958.201.054	87,72
BELANJA MODAL	105.576.517.055	80.114.171.616	75,88
Belanja Peralatan dan Mesin	25.469.974.050	24.276.338.060	95,31
Belanja Bangunan dan Gedung	46.296.081.936	30.445.933.150	65,76
Belanja Aset Tetap Lainnya	33.810.461.069	25.391.900.406	75,10
Jumlah	1.343.563.330.715	1.173.129.140.338	87,31

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016.

Berdasarkan tabel IV.4 menunjukkan bahwa kemampuan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam menggunakan anggaran pada tahun 2014 kurang baik. Dikarenakan anggaran belanja sebesar Rp. 1.343.563.330.715 dan anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.173.129.140.338 jika dijadikan persen sebesar 87,31% anggaran yang telah terserap.

Pada tahun 2014 ini banyaknya anggaran realisasi dari belanja operasi dan modal. Di belanja Operasi banyaknya realisasi anggaran tidak terserap terjadi pada belanja Dokumen/administrasi Tender, belanja cetak, belanja pakaian dinas harian. Di belanja modal banyaknya realisasi anggaran tidak terserap terjadi pada belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas, belanja modal kelengkapan komputer/flashdisk, pengadaan jaringan komputer, belanja modal pengadaan kursi kerja.

Secara kesimpulan sudah cukup efektif hanya saja pada belanja modal khususnya pada belanja operasi dan belanja modal msh banyak anggaran yang tidak terealisasi. Dikarenakan belanja modal harus disertai dokumen-dokumen yang terkait mengenai anggaran belanja modal, dokumen ini biasanya mengalami revisi memakan waktu yang cukup lama dan akhirnya belanja modal baru bisa dilakukan pada belanja modal tahun berikutnya.

Tabel IV.5
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2015

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.190.237.203.675,08	1.047.585.172.240	88,01
Belanja Pegawai	1.190.237.203.675,08	1.047.585.172.240	88,01
BELANJA LANGSUNG	191.517.184.133,93	184.000.721.816	96,08
Belanja Pegawai	5.045.102.000,00	4.524.992.000	89,69
Belanja Barang dan Jasa	47.009.347.020,00	45.000.036.685	95,73
Belanja Modal	139.462.735.113,93	134.475.693.131	94,42
Jumlah	1.381.754.387.809,01	1.231.585.894.056	89,13

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016.

Berdasarkan tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa kemampuan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam menggunakan anggaran pada tahun 2015 sudah cukup baik. Anggaran belanja sebesar Rp. 1.381.754.387.809,01 dan anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.231.585.894.056 jika dijadikan persen sebesar 89,13% anggaran yang telah terserap.

Pada tahun 2015 untuk belanja pegawai di belanja tidak langsung hanya mencapai persentase terendah sebesar 88,01%. Anggaran yang tidak terealisasi cukup banyak dan sedikit yang menyebabkan anggaran tidak terserap terjadi pada belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai pada belanja tambahan penghasilan PNS, belanja biaya ahli atau narasumber, belanja pegawai uang perjalanan dinas sedikit terpakai dan tidak terserapnya belanja tambahan profesi guru PNSD. Anggaran tidak terserap sepenuhnya dikarenakan pada saat perencanaan anggaran yang diberikan pemerintah nominalnya terlalu besar.

Berdasarkan hasil tabel IV.3, IV.4, dan IV.5 bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tidak terserapnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang secara keseluruhan karena masalah perencanaan dan revisi pelaksanaan anggaran belanja modal yang memakan waktu yang lama. Dan juga nilai nominal anggaran yang terlalu besar akhirnya uang yang diberikan pemerintah tidak terserap 100%.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa :

1. faktor-faktor yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang :

- a. Perencanaan Penganggaran

Proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA):

- 1) Penyusunan Anggaran

Pada tahap awal penyusunan anggaran pemerintah pusat menyampaikan pokok kebijakan fiskal yg disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan Anggaran DIPA memakan waktu 3 bulan atau selambat-lambatnya 5 bulan dari tanggal yang ditetapkan. Dalam rangka penyusunan ini semua menteri/lembaga, Pengguna Anggaran (PA) menyusun rencana kerja anggaran yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) disampaikan pada Menteri keuangan.

- 2) Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen RKA oleh menteri keuangan. Dokumen yang telah disahkan pada menteri tersebut

disampaikan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN). Dokumen penting dalam anggaran seperti DIPA dan dokumen pembayaran seperti SPP, SPM, dan SP2D. Pedoman dalam pelaksanaan belanja yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, Peraturan Dirjern Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanismen pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran, dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3) Pengawasan Anggaran

Pada tahap pengawasan ini terhadap pelaksanaan APBD dilakukan oleh atasan/kepala kantor/satuan kerja, kementrian Negara/lembaga dalam lingkungannya masing-masing. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Pengawasan secara langsung juga dilakukan oleh DPR yang disampaikan oleh instansi pemerintah berupa laporan semester 1 pada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan.

4) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Anggaran

Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun pertanggungjawaban berupa membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan ini didisampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri

Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kelemahan perencanaan anggaran yang berdampak pada anggaran tidak terserap karena dalam melaksanakan perencanaan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dari tahun 2013-2015 memakan waktu hingga 3 bulan. Anggaran belanja merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sehingga pelaksanaan anggaran untuk program yang akan dilaksanakan akan selalu mengalami terhambat dan mengalami kemunduran jadwal dari bulan yang telah ditetapkan dan sering terdapat program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

b. Pelaksanaan Anggaran

Penyebab dalam revisi pelaksanaan anggaran tersebut tidak terserap karena didalam perencanaan penganggaran anggaran yang tidak matang dan mengalami revisi disebabkan pada saat menyusun perencanaan anggaran kurang tepat, sehingga program dan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan. Waktu yang diberikan kepada satuan kerja untuk revisi anggaran dari perencanaan hanya 3 bulan, tetapi karena terlalu banyak revisi anggaran perencanaan lewat dari bulan yang ditetapkan.

c. Internal Satuan Kerja

Kelemahan internal satuan kerja pada saat pengelola keuangan satuan kerja sering mengalami mutasi/pindah kerja ke tempat lain. Selain itu, sumber daya manusia di satuan kerja yang memahami pengelolaan keuangan jumlahnya terbatas. Dan keterbatasan jumlah internal satuan kerja ini yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja,

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Didalam SDM terdapat pihak yang terkait seperti Pihak ketiga dan pegawai yang ikut serta membantu menjalankan program kegiatan atas anggaran yang telah ditetapkan seperti membangun sekolah. Realisasi anggaran bangunan yang tidak terserap ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dimana jika tidak terjadinya pembangunan sekolah pada tahun yang bersangkutan maka tidak ada pegawai yang berkerja dan toko bahan baku mengalami pemasukan yang sedikit.

e. Dokumen

Kelemahan dokumen rencana kerja sangat berpengaruh pada pelaksanaan anggaran, apabilan surat pencairan dana yang ditetapkan pada saat penyusunan DIPA terlalu besar berdampak pada banyaknya realisasi yang tidak tercapai seperti pengadaan barang dan jasa yang pengaruhnya sangat besar dalam penggunaan uang anggaran.

f. Administrasi

Kelemahan sistem administrasi dan prosedur akuntansi anggaran yang tidak dipahami dengan baik mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk mencapai terserapnya anggaran belanja yang telah ditetapkan pemerintah pada masa yang akan datang yaitu antara lain menyediakan kebutuhan anggaran yang diperlukan saja, dalam proses perencanaan penyusunan anggaran setiap program/kegiatan dibuat realistis, masa penyusunan dan penelaahan anggaran dibuat memakan waktu cepat sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun. Menyediakan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus dalam proses penatausahaan keuangan. Dan di bagian Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya rata-rata mengalami perubahan yang besar, mencukupi akan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, SDM pelaksana pengadaan kompeten, rangkap tugas dalam jabatan Panitia Pengadaan dihilangkan. Dokumen-dokumen yang terkait mengenai dokumen pengadaan barang dan jasa dibuat lengkap dan jelas. Menyediakan penyusunan laporan pembiayaan maupun belanja harus disertai dokumen-dokumen penunjang, meminimalkan satuan kerja yang sering mengalami keterlambatan

penetapan surat keputusan pejabat pengelola keuangan yang mempunyai DIPA, dan dana yang dicairkan tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit yang tidak sejalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang mungkin dapat digunakan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan instansi jangka panjang yaitu lebih meningkatkan khususnya perencanaan anggaran belanja yang termasuk didalamnya satuan kerja, sumber daya manusia, dokumentasi dan administrasi yang bersangkutan dengan anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldric Siregar. 2015. **Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI)**. Cetakan Pertama. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Hendris Hendriyanto. 2012. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta**.
- Mardiasmo, 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Pertama, Yogyakarta. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mashudi Adi Nugroho. 2013. **Analisis yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)**.
- Mulyana, Budi, 2010. **Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kementrian Keuangan**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasetyo Adi Priatno. 2013. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar**.
- Sugiyono. 2009. **Metodeologi Penelitian Kombinasi**. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. **Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar**. Malang: Bayumedia Publishing.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan. Dr. Wahidin No, 03 Telp./Fax. 0711 - 350665 353007
Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id
PALEMBANG



Palembang, 17 Mei2016

Nomor : 070/ ¹⁰³⁴ /26.8/PN/2016
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
di-
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1137/H-5/FEB-UMP/XI/2015 tanggal 10 November 2015 perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan memberikan perpanjangan izin Penelitian yang dimaksud kepada :

Nama : RIKA VERONIKA
N I M : 22 2012 364
Program Studi : Akuntansi

Untuk mengadakan Perpanjangan Penelitian/Riset di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang (Subbag Umum, Subbag Kepegawaian dan Subbag keuangan).

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan perpanjangan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Kepala Dinas Dikpora (Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan) Palembang
2. Perpanjangan penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan perpanjangan penelitian yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan judul yang telah ditentukan
3. Dalam melakukan perpanjangan penelitian, peneliti harus mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Apabila perpanjangan izin Penelitian telah habis masa berlakunya, sedangkan tugas penelitian belum selesai maka harus ada perpanjangan izin
5. Surat izin berlaku 3 (tiga) bulan terhitung tanggal dikeluarkan
6. Setelah selesai mengadakan perpanjangan penelitian harus menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang melalui Kasubbag Umum.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas

Sekretaris,



Drs. H. Karim Kasim, SH., MM
Pembina

NIP 196208011985101001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan. Dr. Wahidin No, 03 Telp./Fax. 0711 - 350665 353007
Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id
PALEMBANG



SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/1588 /26.8/PN/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Karim Kasim,SH,MM
NIP : 196208011985101001
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

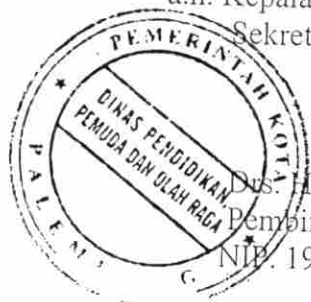
Nama : RIKA VERONIKA
NIM : 22 2012 364
Program Studi : Akuntansi

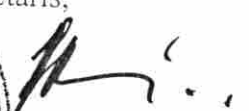
Memang benar telah selesai mengadakan Penelitian di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang (Subbag Umum, Subbag Kepegawaian dan Subbag Keuangan).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 5 Agustus 2016

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,




Drs. H. Karim Kasim,SH,MM
Pembina
NIP. 196208011985101001



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Rika Veronika	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 364	KETUA H. M. Basyaruddin R, SE., Ak., M.Si., CA
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Faktor-faktor Penyebab Tidak Terserapnya Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	18/07-2016	Perbaiki kesimpulan dan saran di bab V			Perbaiki
2					
3		Bab I - V			Keg lupis abstrak
4					
5	24/7-16	Bab I - V			Abstrak menggambar dan ringkas hasil penelitian & simpulannya
6					
7					
8					
9	7/8-16	Bab I - V			Simpulan tidak fokus.
10					
11		Bab I - V			Perbaiki simpulan & fokus pada pen- mendasar dan terukur.
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi,
6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :



(Signature)

Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/ I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/ 2015 (B)

Website : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpglg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Agustus 2016
Pukul : 08:00 s/d 12:00 wib
Nama : Rika Veronika
NIM : 22 2012 364
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Faktor-faktor Penyebab Tidak Terserapnya Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

**TELAH MEMPERBAIKI DAN MENSETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	H. M. Basyaruddin, R, S.E., Ak., M.Si., CA	Pembimbing	9 / 9 / 2016	
2	H. M. Basyaruddin, R, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	9 / 9 / 2016	
3	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji 1	6/9/2016	
4	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji 2	6/9/2016	

Palembang, September 2016
Dekan,
Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Jolani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RIKA VERONIKA
NIM : 222012364
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (18)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 24/3.16

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI



REKOR

No. 030/H-4/LPKKN/UM/P/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : RIKA VERONIKA
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012364
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 15-07-1994
telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Sukajadi
Kecamatan : Talang Kelapa
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui
Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA
LPKKN
PALEMBANG
Ketua LPKKN,
Ahnanannasir, M.Si.

Palembang, 30 September 2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Uri Palembang 30263

Telp. (0711) 522637 - Fax. (0711) 522637

email: lembaga@pmb.uin-palembang.ac.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Rika Veronika
 Place/Date of Birth : Palembang, July 15th 1994
 Test Times Taken : +3
 Test Date : July 22nd 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 48
 Structure Grammar : 34
 Reading Comprehension : 38
 OVERALL SCORE : 400

Palembang, July 25th 2016

Chairperson of Language Laboratory

R. Susanti

Rika Susanti, S.Pd., M.A.

BIODATA PENULIS

1. Data Pribadi

- a. Nama : Rika Veronika
- b. NIM : 222012364
- c. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
- d. Jurusan : Akuntansi
- e. Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juli 1994
- f. Alamat : Jln. Basuki Rahmat No.1576 Rt.23 Rw.09 Kel.
Pahlawan Kec. Kemuning 30126 Palembang
- g. Nomor Hp : 081222682898
- h. Email : rikaveronika1994@yahoo.com

2. Data Orang Tua

- a. Ayah : Azop
- b. Ibu : Zulharijum (almh)
- c. Alamat : Jln. Basuki Rahmat No.1576 Rt.23 Rw.09 Kel.
Pahlawan Kec. Kemuning 30126 Palembang
- d. Pekerjaan
- 1) Ayah : Wiraswasta
- 2) Ibu : -

Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Tahun
1	SD Negeri 179 Palembang	2000-2006
2	SMP Negeri 3 Palembang	2006-2008
3	SMA Muhammadiyah 1 Palembang	2008-2012